

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang terkenal akan budaya dan pariwisata, bahkan Yogyakarta merupakan daerah tujuan wisata untuk berlibur menikmati suasana indah. Tidak sedikit sekolah-sekolah di Jawa dan luar Jawa melakukan kunjungan pendidikannya ke Yogyakarta, dan tidak sedikit pula wisatawan lokal maupun asing yang datang untuk menikmati wisata yang ada di Yogyakarta.

Arah pembangunan kepariwisataan DIY juga semakin jelas dan mantap, dengan mengacu kepada Perda DIY No. 1 Th. 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARDA) DIY, yang menjadi sumber rujukan utama untuk memandu arah pengembangan kepariwisataan DIY yang berwawasan budaya. Perda tersebut telah secara eksplisit memberikan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh seluruh stakeholder kepariwisataan DIY, tuntutan sinergitas antar sektor, serta pembagian peran para actor/pelaku pembangunan, untuk mencapai visi pembangunan kepariwisataan yang telah ditetapkan. (Statistik Kepariwisata DIY Tahun 2016).

Semakin banyanya wisatawan yang datang berkunjung ke Yogyakarta, maka semakin tinggi ketertarikan daerah daerah di yogyakarta untuk mengembangkan potensi di daerahnya menjadi obyek wisata, baik itu wisata budaya ataupun wisata alam. Pada tahun 2016 jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY menurut statistik DIY yaitu 4.549.574 terdapat peningkatan yang signifikan dari tahun 2015 yang berjumlah 4.122.405. peningkatan tersebut tidak terlepas dari pengembangan pariwisata di daerah-daerah yang ada di DIY .

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Gunungkidul, karena memang sejak 2014 ini Gunungkidul sedang mengembangkan obyek wisata untuk meningkatkan PAD, Menurut Oda dalam Tribun Jogja 26 Juni 2017 Jumlah pengunjung ke Gunung Kidul terus meningkat, pada tahun 2017 jumlah pengunjung di seluruh objek wisata mencapai sekitar 12.000 pengunjung dan dari data sementara yang hari ini, jumlah pengunjung mencapai 39.554 orang dengan jumlah PAD Rp. 305.614.000. Tarif retribusi di setiap objek wisata yang terdapat di Gunungkidul berbeda-beda.

Untuk kawasan Pantai Ngrehnan, Pantai Ngobaran, Pantai Nguyahan, Pantai Siung, dan Pantai Wediombo ditarik Rp. 5.000,-. Sedangkan Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, Pantai Krakal, Pantai Drini, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Pulangsawal, dan Pantai Pok Tunggal senilai Rp. 10.000,-. Sementara itu, untuk wisata Goa Pindul Rp. 10.000,-, daerah wisata Nglanggeran, wilayah wisata daerah Bleberan Rp. 2.000,-, sedangkan untuk tarif retribusi di Kalisuci Rp. 5.000,-.

Dalam pengembangan obyek wisata di Gunung Kidul, tentunya tidak terlepas dari munculnya Desa Wisata Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) dalam Prasukmana dan Muhadi (2001: 8), yang dimaksud dengan Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.

Kabupaten Gunung Kidul, khususnya yang akhir-akhir ini terdapat konflik dalam pengelolaan obyek wisata yaitu di obyek wisata Goa Pindul, dimana di Goa Pindul Terdapat dua organisasi berbeda yang dapat mengelola pariwisata di desa, yaitu kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dimana fungsi Pokdariws dalam pengelolaan desa wisata sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata dan sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah, Yang kedua BUMDes sebagai lembaga yang mengatur keuangan Desa. Tidak menutup memungkinkan menimbulkan konflik di antara keduanya karena memang tidak dapat di tutup-tutupi pariwisata menyumbang pendapatan yang besar bagi suatu daerah. Seperti yang terjadi di Gunung Kidul, yaitu di obyek wisata Goa Pindul, dimana obyek wisata Goa Pindul sebelumnya di kelola oleh

Pokdarwis Bejiharjo, setelah di bentuknya BUMDes, mengacu pada UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Pasal 87 UU Desa dan pasal 132 PP No. 43 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap desa di beri peluang yang sama untuk mendirikan BUMDes, pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan desa.maka segala pengelolaan keuangan di laksanakan oleh BUMDes.

Sebelumnya, obyek wisata Goa Pindul di kelola oleh Pokdarwis Desa Bejiharjo, namun dengan dibentuknya BUMDes, maka segala yang termasuk dalam badan usaha desa di kelola oleh BUMDes agar terserap ke PADes, namun Menurut Bagyo pengelola Pokdarwis Desa Bejiharjo, dalam TribunJogja.com edisi Jumat 9 September 2018 kalau saat ini dibentuk BUMDes, Pokdarwis tidak setuju, karena aset masing-masing kelompok pengelola sudah besar, apakah Desa mampu membeli semua aset milik semua operator yang ada, saat ini pengelolaan desa wisata sudah terbagi menjadi dua. Pertama adalah dikelola kelompok-kelompok seperti yang terjadi di Gua Pindul, kemudian yang kedua dikelola BUMdes. Dua mdoel ini semestinya menjadi bagian dari model pengelolaan yang harus dibimbing, bukan dipaksa dibentuk.

Sementara itu, Kepala Disbudpar Gunungkidul Saryanto dalam TribunJogja.com edisi Jumat 9 September 2018 mengatakan, pembentukan BUMDes dilakukan agar semua terkoordinir dan juga memberikan kontribusi terhadap desa dan masyarakat. Namun dengan adanya komunikasi dan adanya audiensi antara BUMDes dan Pokdarwis Bejiharjo, maka ditemukan

kesepakatan bahwa pengelolaan obyek wisata Goa Pindul dikelola bersama oleh BUMDes dan Pokdarwis bejiharjo. Dengan adanya kerjasama tersebut, peneliti ingin melihat lebih jauh bagaimana bentuk kolaborasi antara BUMDes dengan Pokdarwis Bejiharjo dalam mengelola Pariwisata Goa Pindul, karena konflik seperti yang di jelaskan di atas tidak menutup kemungkinan terjadi di daerah lain yang baru membentuk BUMDes, dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada setiap desa wisata dalam pengelolaan desa wisata koordinasi antara BUMDes dan Pokdarwis.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat di buat rumusan sebagai berikut:

*Bagaimana Kolaborasi antara BUMDes Maju Mandiri dan Kelompok Sadar Wisata dalam mengelola obyek wisata Goa Pindul di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul ?*

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kolaborasi antara BUMDes Maju Mandiri dan Pokdarwis Desa Bejiharjo dalam mengelola obyek wisata Goa Pindul.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Menjadi informasi bagi akademisi yang tertarik pada pengembangan wisata, khususnya desa wisata dalam upaya melakukan Kolaborasi.
- b. Sebagai tambahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat Desa Bejiharjo. Menambah wawasan tentang pentingnya koordinasi dalam pengembangan desa wisata agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat.
- b. Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul dan desa wisata lainnya. Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan desa wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul.

## **E. PENELITIAN TERDAHULU**

1. Asri Suwastini (Skripsi S1 ANUNS) meneliti tentang “*Collaborative Governance* KPA dengan LSM-LSM peduli Aids di Kota Surakarta” dengan hasil penelitiannya Pemerintah Kota Surakarta hanya setengah hati dalam mengupayakan penanganan kasus HIV/AIDS, hal ini dapat dibuktikan dengan struktur KPA yang sangat lebar dan hanya formalitas belaka.
2. Sudarmo (Laporan Hibab Strategis Nasional) meneliti tentang “Tindakan Kebijakan Kolaborasi Antar Stakeholder Secara Partisipatif Dalam Pemecahan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Solo Raya”, hasil penelitiannya tidak ditemukan kolaborasi antara pemerintah daerah/kota solo raya secara nyata dalam menangani, mengelola, mengelola, memberdayakan, dan mengontrol PKL, karena mereka tidak memiliki persamaan visi, misi dan juga perbedaan kepentingan terhadap penataan PKL secara terintegrasi dan sinergis. Dan ditemukan sejumlah pola penanganan PKL secara berbeda-beda.
3. Junaidi (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Upaya Penyelesaian Krisis Listrik Di kota Tanjung Pinang”, dengan hasil penelitiannya bahwa krisis listrik di kota Tanjung Pinang memerlukan banyak pihak untuk mengatasinya. Seharusnya saat ini pemerintah pusat pemerintah daerah dan PT PLN harus melakukan kolaborasi dalam upaya menyelesaikan krisis listrik yang semakin parah ini dapat diselesaikan.

4. Sambodo, G. T., & Pribadi, U. (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Collaborative Governance Di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, Di. Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot dipengaruhi oleh Starting Condition, Institutional Design, dan Facilitative Leadership. Namun pada pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot faktor Starting Condition, Institutional Design, dan Facilitative Leadership serta Collaborative Process, juga dipengaruhi oleh faktor budaya seperti hubungan kekerabatan, arisan, jam karet, musyawarah mufakat, ngaruhke, gotong royong dan swadaya serta mokogi.
5. Sulistiyoningsih, Ayu. (2013) dengan judul penelitian “Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta”. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa sudah menunjukkan proses kolaborasi yang baik. realitas tersebut dapat dilihat dari proses kolaborasi yang melibatkan pihak pemerintahan dengan non-pemerintah yang berlangsung secara demokratis yang diwujudkan dengan musyawarah mufakat. Proses kolaborasi dilakukan dengan melakukan komunikasi dan koordinasi secara langsung serta membangun kepercayaan antar aktor kolaborasi, dan berbagi informasi antar aktor yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengelolaan kawasan Malioboro. Kolaborasi dalam pengelolaan kawasan Malioboro

menghasilkan konsensus yang terwujud dalam bentuk program dan kebijakan pemerintah.

## **F. KERANGKA TEORI**

### **1. Governance**

*Governance* tidak sama dengan *government* (pemerintah), dalam arti sempit *governance* adalah sebagai lembaga, tetapi *governance* dalam arti yang luas adalah proses pemerintahan (Dwipayana dkk, 2003:8). Dalam konteks *govement* lebih diartikan sebagai “mereka” sedangkan *governance* lebih diartikan sebagai “kita”, dalam hal ini kontek *govement* dilihat seolah-oleh hanya pemerintah atau politisi yang dapat mengatur, melaksanakan sesuatu, dan memberikan sebuah pelayanan, akan tetapi jika dilihat dari kontek *governance* atau “kita” memberikan penjelasan bawasanya terdapat peleburan antara yang “memerintah” dan yang “diperintah” karena *governance* ini melibatkan semuanya dalam berbagai proses *governance*.

Konsep *governance* itu sendiri menegaskan bahwa pemerintah hanyalah sebagai salah satu aktor yang ikut dalam proses *governance* dan tidak harus menjadi aktor yang paling menentukan, dalam implikasinya peran dari pemerintah penyedia pelayan publik atau pembangun infrastruktur yang bisa jadi akan bergeser menjadi pendorong sebagai pihak yang memfasilitasi pihak lain atau sektor swasta yang memiliki peran

aktif dalam mewujudkan upaya kebijakan atau program tersebut (Sumarto, 2004:2).

Menurut Cheema (Keban, 2008:38) *governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. Menurut Kapucu, Naim; Farhod Yuldashev, and Erlan Bakiev , (2009:45) *Governance* adalah sebuah proses pembuatan keputusan dengan melibatkan aktor *state* dan *nonstate*. *Governance* memandu proses yang mempengaruhi keputusan dan prosedur dalam sektor privat, publik dan sipil.

Sedangkan *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam (Sedarmayanti,2003:5) berpendapat *Governance* sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Karena itu instansi dari *governance* meliputi 3 intitusi yaitu sebgai berikut: *state* ( pemerintah), *society* (masyarakat), dan *private sector* ( sektor swasta atau dunia usaha)

Menurut Dwiyanto (2005: 79-81) Menjelaskan bahwa *governance* adalah pelaksana fungsi *governing* yang secara bersama-sama pihak pemerintah dengan pihak intansi-instansi lainnya seperti LSM, perusahaan dan pihak lainnya dalam pengambilan keputusan, ataupun pelaksanaan program maupun kebijakan publik hal ini menunjukan bawasannya kekuasaan tidak hanya dimiliki pemerintah atau menjadi urusan dari

pemerintah. Meskipun perspektif *governance* mengimplikasikan terjadinya pengurangan peran pemerintah, pemerintah sebagai institusi tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Sedangkan menurut bevir dalam Zaenuri (2016: 20) menjelaskan bahwa *governance* adalah bentuk transformasi sistem tata kelola pemerintah yang meliputi beberapa spek yang dimulai dari perubahan sistem hirarki dan jaringan pasar kemitraan, interkoneksi administrasi dengan masyarakat sipil, perubahan aktivitas pemerintah dari negosiasi dan diplomasi, serta keterlibatan lembaga non negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Ada beberapa dimensi penting dari *governance*.

Dwiyanto (Nurhaeni, 2010:25-26) menjelaskan bahwa dimensi pertama dari *governance* adalah dimensi kelembagaan, yang menjelaskan bahwa *governance* merupakan sebuah sistem yang melibatkan banyak pelaku (*multi stakeholders*), baik dari pemerintah maupun dari luar pemerintah dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan untuk menanggapi masalah dan kebutuhan publik. Dimensi kedua dari *governance* adalah nilai yang menjadi dasar dalam penggunaan kekuasaan. Nilai-nilai administrasi publik yang tradisional seperti efisiensi dan efektifitas telah bergeser menjadi nilai keadilan sosial, kebebasan dan kemanusiaan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa *Governance* adalah sistem kelembagaan yang memberi respon

terhadap berbagai masalah publik yang muncul di masyarakat yang melibatkan banyak pelaku baik dari pemerintah dan kelompok kepentingan dalam proses formulasi serta diimplementasikan untuk mencapai tujuan dan atau menyelesaikan masalah bersama.

## **2. *Collaborative Governance***

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. CIFOR/PILI, dalam Haryono (2012: 7).

Gray dalam Haryono (2012: 48). menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berfikir dimana pihak yang terklibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan. Pada artikel ini kolaborasi dimaknai sebagai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.

Sedangkan menurut Sudarmo (2011:102-104) pada umumnya, *collaboration* dipandang sebagai perselisihan yang bisa disebabkan karena banyaknya kebijakan, dan respon dari organisasi terhadap perubahan atau pergeseran dalam lingkungan kebijakan yang menjadi isu-isu semakin meluas keranah publik dari batasan norma-norma, kapasitas pemerintah pusat umumnya semakin meningkat serata pada diluar pemerintah daerah atau kota serta inisiatif spontan ditujukan untuk masyarakat luas.

Menurut Agustina (2017: 60-80) *collaborative governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terikat untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan Ansell dan Gash mendefinisikan Collaborative Governance sebagai Sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau asset publik. Definisi tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik, antara lain:

- a. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.
- b. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik.

- c. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik.
- d. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama.
- e. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.
- f. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Menurut Ansell and Gash dalam Putro (2014: 25-30) Collaborative governance muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi
- b. Konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam
- c. Upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik
- d. Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan.
- e. Ketidakmampuan kelompok-kelompok, terutama karena pemisahan regimregim kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan.
- f. Mobilisasi kelompok kepentingan

- g. Tingginya biaya dan politisasi regulasi
- h. Pemikiran-pemikiran yang semakin luas tentang pluralisme kelompok kepentingan
- i. Adanya kegagalan akuntabilitas manajerialisme (terutama manajemen ilmiah yang semakin dipolitisasi) dan kegagalan implementasinya.

Adanya kolaborasi dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul dikarenakan kompleksitas dan saling ketergantungan antar instansi. Dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul tidak dapat dijalankan oleh satu instansi saja karena untuk melaksanakannya melibatkan berbagai bidang yang berbeda-beda seperti keunagan, pelatihan, pemasaran, dan pembinaan sehingga ini dilakukan oleh beberapa pihak dengan kewenangan masing-masing. Adanya *collaborative governance* ini memunculkan sifat adaptif terhadap satu persoalan yang menuntut pemecahan berbagai berbagai pihak atau instansi terhadap suatu persoalan yang bisa dibawa kedalam bentuk-bentuk *collaborative governance* yang bervariasi antara lain: manajemen, komunikasi, keterlibatan wakil rakyat, negosiasi, regulasi, dan bentuk kolaborasi lainnya yang mencakup berbagai *stakeholder* yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program ataupun kebijakan.

- a. Ukuran Keberhasilan Kolaborasi

DeSeve (2007: 50) dalam Putro (2014: 29-35) menyebutkan bahwa terdapat delapan item penting yang bisa dijadikan untuk mengukur

keberhasilan sebuah network atau kolaborasi dalam governance, yang meliputi :

1) Jenis struktur jaringan

Mendeskripsikan secara konseptual keterkaitan antar elemen satu dengan yang lain menyatu secara bersamaan untuk menjelaskan beberapa unsur fisik jaringan, yang kaitnya dengan bentuk *networked structure*, seperti *clusture* dan *spoke* yang digunakan.

2) Komitmen Terhadap Tujuan

Komitmen terhadap tujuan mengacu pada alasan mengapa sebuah network atau jaringan harus ada. Alasan mengapa sebuah network harus ada adalah karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif. Tujuan-tujuan ini biasanya teraktulisasikan kedalam misi umum suatu organisasi pemerintah.

3) Adanya saling percaya diantara para pelaku/peserta yang terangkai dalam jaringan

Kepercayaan diantara para partisipan didasarkan pada hubungan professional atau sosial, keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha dari stake holder lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama.

#### 4) *Governance*

Kejelasan dalam tata kelola termasuk boundary dan exclusivity, rules, self determination, dan network manajemen. Boundary dan exclusivity menegaskan siapa yang termasuk anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota, harus ada kejelasan siapa saja yang termasuk dalam jaringan dan siapa yang ada di luar jaringan. Rules berkaitan dengan aturan-aturan yang menegaskan sejumlah pembatasan perilaku anggota komunitas dengan ancaman bahwa mereka akan dikeluarkan jika perilaku mereka menyimpang atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Self determination yaitu kebebasan untuk menentukan bagaimana network atau kolaborasi akan dijalankan dan siapa saja yang diijinkan untuk menjalankannya. Network management berkaitan dengan resolusi penolakan/tantangan, alokasi sumber daya, kontrol kualitas, dan pemeliharaan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa ciri sebuah kolaborasi yang efektif adalah jika kolaborasi didukung sepenuhnya oleh semua anggota network tanpa konflik dan pertentangan *dalam pencapaian tujuan,*

#### 5) Akses terhadap kewenangan

Akses terhadap otoritas yakni tersedianya standar-standar ketentuan prosedur-prosedur yang jelas yang diterima secara luas. Dari kebanyakan kolaborasi memberikan otoritas untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan dalam menjalankan tugasnya.

6) Pembagian akuntabilitas/responsibilitas

Pembagian akuntabilitas/responsibilitas yakni berbagi governance (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan stakeholder lainnya) dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan , dengan demikian berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan.

7) Berbagi informasi

Yaitu kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan privacy, dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudahan akses ini bisa mencakup sistem, software dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses informasi.

8) Akses terhadap sumber daya

Yakni ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan network.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* yaitu struktur organisasi pemerintahan diamanatkan yang secara langsung mengajak pemilik kepentingan dalam membuat keputusan bersama-sama dalam forum yang bersifat normal, ada kebebasan, dan berorientasi pada konsensus yang mempunyai tujuan untuk melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau asset secara bersama-sama.

### **3. Pengelolaan Pariwisata**

#### **a. Pariwisata**

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah.

Gunn dalam Taryana (2013) mendefinisikan wisata sebagai suatu pergerakan sementara manusia menuju tempat lain dari tempat tinggal dan bekerja asalnya, selama tinggal ditempat tujuan tersebut melakukan kegiatan dan diciptakan fasilitas untuk mengakomodasikan kebutuhan. Gunn dalam Taryana (2013) juga menyatakan bahwa suatu kawasan dikembangkan untuk tujuan wisata karena terdapat atraksi yang merupakan komponen dari suplai. Atraksi tersebut merupakan alasan terkuat untuk suatu perjalanan wisata, (dapat berupa ekosistem, tanaman langka, landmark, atau satwa) yang dapat ditemukan di perkotaan dan perdesaan. Pariwisata perdesaan tentunya berbeda dengan pariwisata perkotaan baik dalam hal obyek, lokasi, fungsi, skala maupun karakternya yang tentunya membawa konsekuensi terhadap perencanaan dan pengembangannya (Widiyanto et al. dalam Taryana 2013).

Sukmana dalam Taryana (2013) menyebutkan bahwa Desa Wisata merupakan model konsep yang baik dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan nilai lokal. Desa Wisata adalah salah satu bentuk pariwisata berbasis masyarakat yang muncul pada pertengahan tahun 1990.

Menurut Spinllane (dalam Fitriana, 2013: 8) pariwisata sudah ada sejak dimulainya peradaban manusia dengan ditandai oleh adanya pergerakan penduduk yang melakukan ziarah dan perjalanan agama. Manusia menyadari bahwa pariwisata merupakan agen perubahan yang mempunyai kekuatan besar dan dahsyat, namun kajian aspek sosial budaya dari kepariwisataan relatif jauh tertinggal. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Definisi atau pengertian pariwisata menurut Mc. Intosh dan Goelder (dalam Fitriana, 2013: 9) mengungkapkan bahwa Pariwisata adalah ilmu atau seni dan bisnis yang dapat menarik dan menghimpun pengunjung, termasuk didalamnya berbagai akomoditsi dan cathering yang dibutuhkan dan diminati oleh pengunjung. Sedangkan menurut Spilllane (dalam Fitriana 2013: 9) pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dan bersifat sementara, dilakukan perorangan ataupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan, keserasian dalam dimensisosial budaya dan ilmu.

b. Jenis dan Bentuk Pariwisata

Pariwisata memiliki jenis dan bentuk yang berbeda sesuai dengan potensi yang ada, berikut Jenis dan Bentuk Pariwisata :

1) Jenis Jenis Pariwisata

Berikut jenis-jenis Pariwisata menurut Spillane (dalam Alfira, 2014: 20-21):

a) Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*).

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam, atau bahkan untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian di daerah luar kota.

b) Pariwisata untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*).

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan keletihan dan kelelahannya.

c) Pariwisata untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*).

Jenis pariwisata ini dilakukan karena adanya keinginan untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat daerah lain.

2) Bentuk Pariwisata

Secara umum bentuk pariwisata adalah semua yang berhubungan dengan objek yang dapat disaksikan pengunjung pada situasi tertentu dan waktu yang tepat, serta kemauan untuk mengunjungi objek tersebut. Adapun bentuk dan jenis pariwisata menurut Yoeti (dalam Fitriana, 2013: 13) di kelompokkan menjadi sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Letak Geografi, yaitu pariwisata lokal, pariwisata regional, nasional tourism, regional international tourism, international tourism.
- b) Berdasarkan Tujuan yaitu pariwisata rekreasi, pariwisata budaya, pariwisata olahraga, pariwisata sosial, pariwisata kesehatan, pariwisata politik, pariwisata keagamaan
- c) Berdasarkan Pengaruh terhadap neraca pembayaran yaitu pariwisata aktif adalah kegiatan pariwisata yang mendatangkan devisa dengan masuknya wisatawan asing ke dalam suatu negara tertentu, pariwisata pasif adalah kegiatan pariwisata yang mengurangi cadangan devisa negara ditandai dengan keluarnya penduduk ke

suatu negara lain ke negara lain untuk melakukan kegiatan kunjungan.

- d) Menurut alasannya yaitu seasonal tourism adalah kegiatan pariwisata yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, occasional tourism (kegiatan pariwisata yang dilakukan menurut kejadian atau event-event tertentu).

### c. Pengembangan Pariwisata

Pengertian dasar yang harus diketahui dalam perencanaan pariwisata adalah mengetahui komponen-komponen pengembangan pariwisata dan hubungan internal di antara komponen-komponen tersebut. Pengembangan adalah kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu di tata sedemikian baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru.

Menurut Hadinoto (dalam Fitriana, 2013: 18) ada beberapa hal yang menentukan dalam pengembangan suatu obyek wisata, yaitu:

- 1) Atraksi Wisata. Atraksi merupakan suatu daya tarik wisatawan untuk berlibur. Atraksi yang diidentifikasi (sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, dan sebagainya) perlu dikembangkan untuk menjadi atraksi wisata. Tanpa atraksi wisata, tidak ada peristiwa, bagian utama lain tidak akan diperlukan.

- 2) Promosi dan Pemasaran. Promosi dan pemasaran merupakan suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi wisata yang ditawarkan dan cara bagaimana atraksi dapat dikunjungi. Untuk perencanaan, promosi merupakan bagian penting.
- 3) Pasar Wisata (Masyarakat pengirim wisata). Pasar wisata merupakan bagian yang penting. Walaupun untuk perencanaan belum atau tidak diperlukan suatu riset lengkap dan mendalam, namun informasi mengenai trend perilaku, keinginan, kebutuhan, asal, motivasi, dan sebagainya dari wisatawan perlu dikumpulkan dari mereka yang berlibur.
- 4) Transportasi. Transportasi mempunyai dampak yang besar terhadap volume dan lokasi pengembangan pariwisata.
- 5) Masyarakat Penerima Wisatawan yang Menyediakan Akomodasi dan Pelayanan Jasa Pendukung Wisata (fasilitas dan pelayanan).

Menurut Suwanto (dalam Fitriana, 2013: 19) unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata, antara lain :

- 1) Obyek dan Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata atau obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata.

Pada umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada :

- a) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
- b) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- c) Adanya spesifikasi/ ciri khusus yang bersifat langka.
- d) Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan;
- e) Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, pantai, hutan dan lain- lain).
- f) Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

## 2) Prasarana Wisata

Prasarana wisata merupakan sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya.

## 3) Sarana Wisata

Sarana wisata adalah kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di

daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.

## **G. DEFINISI KONSEPTUAL**

### 1. Kolaborasi *Governance*

Kolaborasi merupakan suatu upaya untuk melakukan kerjasama yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terikat untuk mengungkap kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama.

### 2. *Governance*

*Governance* adalah sistem kelembagaan yang memberi respon terhadap berbagai masalah publik yang muncul di masyarakat yang melibatkan banyak pelaku baik dari pemerintah dan kelompok kepentingan dalam proses formulasi serta diimplementasikan untuk mencapai tujuan dan atau menyelesaikan masalah bersama.

### 3. Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan pariwisata merupakan upaya untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang di anggap perlu di tata sedemikian baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru.

## **H. DEFINISI OPERASIONAL**

Dalam penelitian ini untuk mengukur keberhasilan Kolaborasi BUMDes dan Pokdarwis Desa Bejiharjo dalam pengelolaan obyek wisata

Goa Pindul, yang diukur dengan Indikator-indikator *Collaborative Governance* sebagai berikut:

Tabel 1.1 Indikator *Collaborative Governance*

| NO | VARIABEL   | INDIKATOR KEBERHASILAN   |
|----|--|--|
| 1  | Struktur Jaringan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterkaitan antar elemen satu dengan lainnya</li> <li>b. Menjelaskan unsur fisik jaringan</li> <li>c. Kaitannya dengan bentuk <i>networked structure</i></li> </ul>  |
| 2  | Komitmen terhadap Tujuan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengapa sebuah <i>network</i> harus ada</li> <li>b. Terdapat perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif</li> <li>c. Teraktualisasikan ke dalam misi umum suatu organisasi pemerintah</li> </ul> |
| 3  | Adanya saling percaya diantara para pelaku/peserta yang terangkai dalam jaringan | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepercayaan didasarkan pada hubungan profesional atau sosial</li> <li>b. Mempercayakan pada informasi atau usaha dari stakeholder</li> </ul>   |
| 4  | <i>Governance</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kejelasan dalam tata kelola</li> <li>b. Boundary dan exclusivity</li> <li>c. Rules</li> <li>d. Self determination,</li> <li>e. Network manajemen</li> </ul>  |
| 5  | Akses terhadap kewenangan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas</li> <li>b. Memberikan otoritas</li> <li>c. Mengimplementasi keputusan</li> </ul>  |
| 6  | Pembagian akuntabilitas responbilitas  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berbagi <i>governance</i> (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan stakeholder lainnya)</li> <li>b. Berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan</li> </ul>          |
| 7  | Berbagi informasi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kemudahan akses bagi para anggota</li> <li>b. Perlindungan privacy</li> <li>c. Keterbatasan akses bagi yang bukan anggota</li> </ul>   |
| 8  | Akses terhadap sumber daya   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan sumber keuangan</li> <li>b. Teknis</li> <li>c. Manusia</li> <li>d. Sumber daya lainnya yang diperlukan</li> </ul>   |

## **I. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Yusuf (2014: 23), penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alamidan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari definisi yang sederhana penelitian kualitatif yaitu menemukan jawaban terhadap suatu pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis.

Kemudian Menurut Shank (2002) dalam Yusuf (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai sebuah penyelidikan empiris yang sistematis terhadap makna. Sistematis dalam konteks ini mengacu sebagai direncanakan, tertib dan umum serta sesuai dengan aturan.

Dengan demikian peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif agar dapat mendeskripsikan yang terjadi di lapangan. Peneliti berusaha menggambarkan tentang objek dan kajian penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Informasi yang disampaikan oleh informan kemudian dikumpulkan dan dianalisis, hasil analisis tersebut dapat berupa dekskripsi kemudian di interpretasi dan hasil akhirnya berupa laporan tertulis.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, di Obyek Wisata Goa Pindul tepatnya pada BUMDes Maju Mandiri dan Pokdarwis.

## 3. Unit Analisis

Unit analisis data adalah satuan yang diteliti berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2005:75). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan Pemerintah Desa Bejinghamarjo, Pengelola BUMDes, dan Pokdarwis Desa Bejiharjo.

## 4. Jenis Data

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan. Peneliti berusaha menggali segala bentuk informasi yang diperoleh langsung dari hasil pembicaraan atau wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada sumber yang telah ditetapkan seperti ketua Pokdarwis dan Wakil Direktur BUMDes Maju Mandiri.

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, baik dari dokumen, laporan tahunan maupun data-data yang mendukung lainnya. Data sekunder dalam dalam penelitian ini diperoleh dari

dokumen dari BUMDes Maju Mandiri dan POKDARWIS Dewa Bedjo yang didapat oleh peneliti melalui internet maupun secara langsung, buku-buku, makalah, jurnal dan arsip yang berhubungan dengan penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara tatap muka. Sebelum melaksanakan wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bahan yang ingin dicari dan pertanyaan itu nantinya bisa dikembangkan. Setelah pertanyaan sudah tersedia barulah mencari narasumber atau informan, informan yang dipilih adalah informan yang benar-benar paham, mengetahui dan mengalami atau ikut terlibat dalam masalah yang ingin dipertanyakan.

Adapun responden yang akan peneliti wawancarai adalah Pemerintah Desa Bejingharjo, Pengelola BUMDes, dan Pokdarwis Desa Bejingharjo.

### b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2012: 240). Teknik ini dilakukan penulis untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang terdapat pada lokasi penelitian.

Dapat berupa jurnal, buku, skripsi maupun laporan-laporan lain yang menunjang dalam penelitian.

## 6. Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono (2015 : 337-445) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktifitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data didefinisikan sebagai pengorganisasian, penggabungan informasi, yang mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan melibatkan peneliti melakukan interpretasi data yang telah di display. Cara yang dilakukan meliputi perbandingan pengelompokan membuat pola dan melakukan triangulasi.

## **J. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penelitian ini disusun dalam empat bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam Bab I akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka pemikiran, definisi konsep dan definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi.
2. Dalam Bab II akan menguraikan tentang objek peneitian yang akan dilakukan.
3. Dalam Bab III akan menguraikan dan menganalisis Kolaborasi BUMDes dan Pokdarwis Desa Bejiharjo dalam pengelolaan obyek wisata Goa Pindul.
4. Dalam Bab IV menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang akan di laksanakan.